



# Pernah Ditangani Polresta, Sempat Diambil Alih Polda

**PONTIANAK**-Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyebut dirinya tidak terkait dengan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) 2006, 2007, dan 2008 itu. Dia beralasan pada waktu itu dirinya bukan wali kota melainkan wakil wali kota. Menurutnya wakil

wali kota tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk dana bansos dan hibah. "Waktu itu saya tidak mengelola keuangan. Pengelolaan bansos 2006 ada di sekda, sedangkan 2007 dan 2008 ada pada BPKAD," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pada 2006, 2007, dan 2008 wali kota Pontianak dijabat oleh Buchary A Rachman, sedangkan sekretariat daerah dijabat Hasan Rusbini. Sutarmidji bersama Paryadi



Waktu itu saya tidak mengelola keuangan. Pengelolaan bansos 2006 ada di sekda, sedangkan 2007 dan 2008 ada pada BPKAD



**Sutarmidji**  
Wali Kota Pontianak

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



## Pernah Ditangani Polresta . . .

*Sambungan dari halaman 1*

menjabat sebagai wali kota dan wakil pada Desember 2008. Sutarmidji mengatakan bahwa pengelolaan dana bansos ketika dirinya menjabat wali kota berbeda dengan pemimpin terdahulu. Dia mengaku menerapkan transparansi. "Ketika saya menjabat hingga sekarang semuanya harus transfer rekening. Penerima bansos dan jumlah uangnya semuanya diumumkan lewat media," ungkapnya.

Sutarmidji berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum dugaan korupsi dana bansos. Dia mempersilakan jaksa untuk melihat, meminjam, atau menyita dokumen terkait perkara tersebut. "Pemkot akan bantu apa yang dibutuhkan (jaksa) selama itu untuk penegakkan hukum," ucapnya.

Dugaan korupsi bansos Kota Pontianak 2006, 2007, dan 2008 ini sebetulnya bukan hal baru. Pada 2009 indikasi korupsi sebetulnya sudah terendus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar ketika menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial tiga tahun anggaran tersebut. Indikasi kerugian daerah kala

itu sebesar Rp21,46 miliar.

Polresta atau Poltabes Pontianak pernah menangani dugaan korupsi bansos itu. Bahkan setelahnya, Polda Kalbar mengambil alih. Pada 23 Desember 2010 pernah menurunkan berita terkait hal ini. Kala itu, Polda Kalbar langsung merespon temuan indikasi kerugian daerah Rp21,46 miliar pada pengelolaan Bansos Kota Pontianak. Temuan BPK Kalbar ini menjadikan pijakan awal untuk menyelidiki keterlibatan pejabat yang memanfaatkan dana sosial untuk kepentingan pribadi. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Erwin TPL Tobing saat itu menegaskan telah membentuk tim untuk menyelidiki kemungkinan indikasi korupsi bansos. "Tim baru sudah kita bentuk menangani kasus ini," ujar.

Pembentukan tim, lanjut Kapolda, sebagai bukti kesediaan pihaknya menangani Bansos Kota Pontianak. Polda akan mengambil alih kasus ini lantaran Poltabes Pontianak sedang serius menangani Bansos Provinsi.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji pada 2010 juga sempat diseret-seret dalam kasus bansos ini. Dia disebut menyalurkan sejumlah dana bansos.

Sutarmidji menanggapi tudingan tersebut melalui Pontianak Post yang terbit

pada 25 Mei 2010. Diakuinya, khusus pertanggungjawaban Bansos 2006 yang disalurkan melalui dirinya telah digelontorkan untuk pembinaan Satpol PP sebesar Rp 1 miliar, untuk BNK Kota Pontianak Rp 400 juta dan Rp 400 juta lain untuk pendanaan Bhakti TNI. Sedangkan sisanya Rp 600 juta dikembalikan ke kas daerah. "Dana ke BNK itu saya belikan komputer untuk tiap Polsek yang ada di Pontianak. Setiap satu polsek mendapatkan dua unit komputer. Dana untuk TMMD di Kota Pontianak digunakan untuk perbaikan jalan dan saluran air di daerah nipah kuning dalam, jalan di gang lamtoro, di gang gunung pandan, dan gang belibis," jelasnya.

Sutarmidji bahkan membeberkan penggunaan dana bansos yang tidak tepat. Misalnya saja untuk membeli obat kuat atau viagra jenis Cialis isi 10 buah sebanyak tiga box mencapai Rp 900 ribu. Tak hanya untuk membeli viagra dari USA itu, Sutarmidji menerangkan oknum tersebut menggunakan uang bansos untuk membeli obat penumbuh rambut seharga Rp170 ribu, dengan biaya ongkos kirim Rp1,1 juta dibeli dari pusat kecantikan di Jakarta dengan nota tertanggal 13 Januari 2006. *(hen)*